




	<b>NOMOR SOP</b>	165/SOP/3000/03/2022
	<b>TGL. PEMBUATAN</b>	18 Juni 2019
	<b>TGL. REVISI</b>	22 September 2020
	<b>TGL. EFEKTIF</b>	15 Maret 2022
<p><b>KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL</b></p> <p><b>MAHKAMAH KONSTITUSI</b> <b>REPUBLIK INDONESIA</b></p> <p><b>PANITERA MUDA II</b></p>	<b>NAMA SOP</b>	Penyusunan Berita Acara Persidangan
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.</li> <li>2. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017</li> <li>3. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi.</li> <li>4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.</li> <li>5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.</li> <li>6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer</li> <li>2. Memiliki kemampuan administrasi yang baik.</li> <li>3. Memiliki kemampuan di bidang hukum.</li> <li>4. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana</li> </ol>



<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.</li> <li>8. Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara</li> <li>9. Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 21 Tahun 2009 Pedoman beracara dalam memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden</li> <li>10. Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden</li> <li>11. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Yustisial.</li> <li>12. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.</li> <li>13. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Mahkamah Konstitusi.</li> <li>14. Peraturan Perundang-undangan yang terkait.</li> </ol>	
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Penyusunan Telaah Perkara</li> <li>2. SOP Penyusunan Putusan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer dan kelengkapannya</li> <li>2. Alat tulis</li> </ol>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
<p>Apabila kegiatan ini tidak terlaksana dengan baik, maka kegiatan lain akan terhambat.</p>	<p>Disimpan sebagai data secara elektronik dan manual.</p>



# SOP: Penyusunan Berita Acara Persidangan

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Ketua MK	Panitera	Panitera Pengganti	Panitera Muda II	Kelengkapan	Waktu (1535 Menit)	Output	
1	Menyusun konsep Berita Acara Persidangan Pemeriksaan Pendahuluan					Aplikasi SIMPP/Berkas Perkara; Catatan Persidangan; Risalah Persidangan.	1440	Konsep Berita Acara Persidangan	Pemeriksaan pendahuluan (PUU, SKLN, pembubaran parpol, dan pendapat DPR) dan waktu selama 8 jam (3 hari kerja) atau 3x8 jam;
2	Panitera Muda Memeriksa dan mengoreksi konsep Berita Acara Persidangan Pemeriksaan Pendahuluan					Aplikasi SIMPP/Konsep Berita Acara Persidangan Pemeriksaan Pendahuluan	30	Konsep Berita Acara Persidangan yang telah dikoreksi	
3	Memeriksa dan mengoreksi konsep Berita Acara Persidangan yang telah diparaf Panitera Muda					Konsep Berita Acara Persidangan yang telah diparaf oleh Panitera Muda	30	Konsep Berita Acara Persidangan yang telah diparaf oleh Panitera	
4	Memeriksa dan menandatangani konsep Berita Acara Persidangan					Konsep Berita Acara Persidangan yang telah diparaf oleh Panitera	30	Berita Acara Persidangan yang telah ditandatangani Ketua Sidang	
5	Menerima, menandatangani dan mengompilasi Berita Acara Persidangan dalam berkas perkara					Aplikasi SIMPP/Berita Acara Persidangan yang telah ditandatangani Ketua Sidang	5	Berita Acara Persidangan yang telah ditandatangani dan dikompilasi dalam berkas perkara	

